

Daftar Pustaka

A. Buku

Afandi , Wahyu, 1981, *Hukum Pengakan Hukum*, Bandung, Alumni.

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.

-----, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.

Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Putra Bardin.

-----, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.

-----, 1996, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung, Binacipta.

Basuki, Wishnu, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa.

B., Robert Seidman, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama.

Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana , Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajagrafindo.

Hamzah, Andi, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.

Hamzah, Andi & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Harsono Hs, C.I., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan.

Kartanegara, Satochid, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V.*

Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

-----, 1986, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Binacipta.

-----, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.

Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.

-----, 1998, *Teori-teori Pidana*, Bandung, Alumni.

Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminal dan Diskriminasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Sahardjo, 1983, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Jakarta, UI Press.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Solehuddin, M., 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya* , Jakarta, Raja Grafika Persada.

Subekti, R., 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

Sujatno , Adi, 2004, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Van Bemmelen, J.M., 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung, Binacipta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widiada Gunawan, A., 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan* , Bandung, Armico.

B. Internet

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2013/12/22/dampak-dampak-negatif-mengonsumsi-narkoba-618713.html> di akses pada tanggal 19 september 2014

<http://kelanakota.suarasurabaya.net/?id> di akses pada tanggal 26 September 2014.

<http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/> di akses pada tanggal 19 september 2014

<http://auliyarahaman.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana.html> di akses pada tanggal 10 Desember 2014

<http://auliyarahaman.blogspot.com/2012/05/hukum-pidana.html> di akses pada tanggal 10 Desember 2014

img.dilmil-bandung.go.id/upload/TASKAP%20yt.pdf di akses pada tanggal 26 September 2014

C. Undang – Undang

Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, angka 11, Pasal 256 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Lihat juga: Pasal 4, Pasal 13 KUHAP, Pasal 1 angka 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembukaan Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.